



LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016



**PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**



Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai.

Binjai, 27 Februari 2017
Pengguna Anggaran

Ir. Dewi Anggeriani
NIP. 19630809 199203 2 002



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan yang terdiri dari 1)Laporan Realisasi Anggaran; 2)Neraca; 3)Laporan Operasional; 4)Laporan Perubahan Ekuitas; 5)Catatan Atas Laporan Ekuitas (Calk) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Binjai, 27 Februari 2017
Pengguna Anggaran

Ir. Dewi Anggeriani
NIP. 19630809 199203 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 1

BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Ke	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	4
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan	4
	2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	5
BAB III	Kebijakan Akuntansi	6
	3.1 Entitas Pelaporan	6
	3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	6
	3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Lap. Keuangan	7
	3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada di SAP	8
BAB IV	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	9
BAB V	Penjelasan Atas Informasi -Informasi Non Keuangan	16
BAB VI	Penutup	21



LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Habis Pakai dan Daftar Persediaan
2. Kartu Inventaris Barang (KIB A)
3. Kartu Inventaris Barang (KIB B)
4. Kartu Inventaris Barang (KIB C)
5. Kartu Inventaris Barang (KIB D)
6. Kartu Inventaris Barang (KIB E)
7. Kartu Inventaris Barang (Aset Lain-Lain)



NERACA
PEMERINTAH KOTA BINJAI

Per 31 December 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan
 Unit Organisasi
 Sub Unit Organisasi

: 2 . 01
 : 2 . 01 . 01
 : 2 . 01 . 01 . 01

Urusan Pilihan Pertanian
 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

URAIAN	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di BLUD	0.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	0.00	0.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00
Penyisihan Piutang	0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	1,383,850.00	1,784,050.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,383,850.00	1,784,050.00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0.00	0.00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0.00	0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00
ASET TETAP		
Tanah	1,384,145,800.00	286,127,400.00
Peralatan dan Mesin	5,428,329,831.71	5,281,649,831.71
Gedung dan Bangunan	3,460,688,371.00	3,430,688,371.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,447,304,024.00	7,427,304,024.00
Aset Tetap Lainnya	65,062,000.00	65,062,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	-9,521,321,146.71	-8,807,914,747.70
JUMLAH ASET TETAP	8,264,208,880.00	7,682,916,879.01
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
Aset Lain-lain	43,801,953.99	1,192,109,777.26
JUMLAH ASET LAINNYA	43,801,953.99	1,192,109,777.26
JUMLAH ASET	8,309,394,683.99	8,876,810,706.27
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
Utang Beban	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	26,643,172.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0.00	26,643,172.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	0.00	26,643,172.00
EKUITAS		
EKUITAS	8,309,394,683.99	8,850,167,534.27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8,309,394,683.99	8,876,810,706.27

Binjai, 31 Desember 2016

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NERACA

Printed By Sim03

MOHD.TAUFIQ BAHAGIA, S.Sos, M.SP

NIP. 19660616 198603 1 006



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan	: 2 . 01	Pertanian
Unit Organisasi	: 2 . 01 . 01	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: 2 . 01 . 01 . 01	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN - LRA				
		432,485,400.00	227,831,000.00	52.68	242,121,000.00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	432,485,400.00	227,831,000.00	52.68	242,121,000.00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	432,485,400.00	227,831,000.00	52.68	242,121,000.00
5	BELANJA	13,985,011,113.59	12,591,378,189.00	90.03	14,064,274,829.00
5 . 1	BELANJA OPERASI	13,786,931,113.59	12,393,598,189.00	89.89	12,431,624,829.00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9,199,171,623.59	7,943,651,702.00	86.35	7,282,907,080.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4,587,759,490.00	4,449,946,487.00	97.00	5,148,717,749.00
5 . 2	BELANJA MODAL	198,080,000.00	197,780,000.00	99.85	1,632,650,000.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168,080,000.00	167,780,000.00	99.82	922,819,000.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	198,900,000.00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	269,490,000.00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	241,441,000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-13,552,525,713.59	-12,363,547,189.00	91.23	-13,822,153,829.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-13,552,525,713.59	-12,363,547,189.00	91.23	-13,822,153,829.00

Binjai, 31 Desember 2016
Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Sim04

MOHD.TAUFIQ BAHAGIA, S.Sos, M.SP
NIP. 19660616 198603 1 006



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2016	SALDO 2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	227,831,000.00	242,121,000.00	-14,290,000.00	-5.90
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	227,831,000.00	242,121,000.00	-14,290,000.00	-5.90
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	227,831,000.00	242,121,000.00	-14,290,000.00	-5.90
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BEBAN	13,395,623,288.00	13,498,632,360.00	-103,009,072.00	-0.76
9 . 1	BEBAN OPERASI	13,395,623,288.00	13,498,632,360.00	-103,009,072.00	-0.76
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	7,927,602,916.00	7,261,333,880.00	666,269,036.00	9.18
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	4,439,752,301.00	5,176,142,044.00	-736,389,743.00	-14.23
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,027,168,071.00	1,061,156,436.00	-33,988,365.00	-3.20
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
9 . 2	BEBAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO		-13,167,792,288.00	-13,256,511,360.00	88,719,072.00	-0.67
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		-26,335,584,576.00	-26,513,022,720.00	177,438,144.00	-0.67

Binjai, 31 Desember 2016
Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN

MOHD.TAUFIQ BAHAGIA, S.Sos,
NIP. 19660616 198603 1 006



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

URAIAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	8,850,167,534.27	15,892,667,124.11
SURPLUS/DEFISIT-LO	-13,167,792,288.00	-13,256,511,360.00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	12,363,547,189.00	13,822,153,829.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	263,472,248.72	-7,608,142,058.84
Koreksi Ekuitas Lainnya	0.00	0.00
Equitas Antar SKPD	0.00	0.00
EKUITAS AKHIR	8,309,394,683.99	8,850,167,534.27

Binjai, 31 Desember 2016
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

MOHD.TAUFIQ BAHAGIA, S.Sos, M.SP
NIP. 19660616 198603 1 006



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai. Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai Tahun 2016 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama TA 2016 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.



Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan merupakan penyajian informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 ini mengacu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai;



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab sebanyak 6 Bab terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III. Kebijakan Akuntansi

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana;



- Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

Bab V. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI. Penutup

**BAB II****IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD****2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai ditetapkan sebesar Rp.432,485,400.00 untuk pendapatan dan Rp.13,985,011,113.59 untuk Belanja Daerah, yang terdiri dari Rp.13,786,931,113,59 untuk Belanja Operasional dan Rp.198,080,000,00 untuk Belanja Modal.

Realisasi target kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai selama tahun 2016 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 1
Iktisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai Tahun 2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan	432,485,400.00	227,831,000.00	204,654,400.00
Belanja	13,985,011,113.59	12,591,378,189.00	1,393,632,924.59
Belanja Operasional	13,786,931,113.59	12,393,598,189.00	1,393,332,924.59
Belanja Modal	198,080,000.00	197,780,000.00	300,000.00
Surplus/(Defisit)	(13,552,525,713.59)	(12,363,547,189.00)	(1,188,978,524.59)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, secara umum Realisasi Pencapaian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai sebesar Rp.227,831,000,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.432,485,400,-. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.12,591,378,189,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.13,985,011,113,59,-, selisih Bertambah/(Berkurang) sebesar Rp.1,393,632,924,59,- sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja daerah. Untuk surplus/(defisit) terdapat defisit sebesar Rp1,188,978,524,59,-



2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2016 dapat dilihat masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi 100%. Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal antara lain disebabkan SDM aparatur yang belum memadai, sarana dan prasarana yang belum optimal, masih adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya mengalami perubahan.



BAB III

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek-praktek yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan per 31 Desember 2016 yaitu sebagai berikut :

3.1. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah .

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan-LO dan beban dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada tahun 2016 Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai sudah menerapkan basis akrual dalam penatausahaan keuangannya dan telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.



Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.



3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

**BAB IV****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang terdiri :

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realiasasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Per 31 Desember 2016

Per 31 Desember 2015

(Rp)

(Rp)

227,831,000,-

242,121,000,-



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) Kota Binjai. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai mengelola retribusi jasa usaha Rumah Potong Hewan, dimana tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015.

2. BELANJA - LRA

Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
(Rp)	(Rp)
12,591,378,189,-	14,064,274,829,-

Pada Tahun Anggaran 2016 secara umum realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi belanja sebesar Rp.12,591,378,189,- dari Pagu anggarannya sebesar Rp.13,985,011,113.59,- atau 90,03% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 1,472,896,640,- dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.14,064,274,829,-. Belanja tersebut terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	13,786,931,113.59	12,393,598,189.00	89.89
Belanja Pegawai	9,199,171,623.59	7,943,651,702.00	86.35
Belanja Barang dan Jasa	4,587,759,490.00	4,449,946,487.00	97.00
BELANJA MODAL	198,080,000.00	197,780,000.00	99.85
Belanja Modal	168,080,000.00	167,780,000.00	99.82
Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00

4.2 Penjelasn Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai dalam satu periode pelaporan unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

Uraian	SALDO 2016 Rp	SALDO 2015 Rp	KENAIKAN/ (PENURUNAN) Rp	(%)
PENDAPATAN - LO	227,831,000.00	242,121,000.00	(14,290,000.00)	(5.90)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	227,831,000.00	242,121,000.00	(14,290,000.00)	(5.90)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	227,831,000.00	242,121,000.00	(14,290,000.00)	(5.90)

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar Rp.14,290,000,- (5,90%), yaitu berasal dari retribusi jasa usaha Rumah Potong Hewan

2. Beban

Pada Laporan Operasional Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai, akumulasi beban hanya berasal dari beban operasional sebesar Rp.13,395,623,288,- yang terdiri dari Beban Pegawai-Lo sebesar Rp.7,927,602,916,-; Beban Barang Jasa sebesar Rp.4,439,752,301,-; Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.1,027,168,071,-; dan Beban lain-lain sebesar Rp.1,100,000,-.

Uraian	Saldo 2016 Rp	Saldo 2015 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
BEBAN OPERASI	13,395,623,288.00	13,498,632,360.00	(103,009,072.00)	(0.76)
Beban Pegawai - LO	7,927,602,916.00	7,261,333,880.00	666,269,036.00	9.18
Beban Barang dan Jasa	4,439,752,301.00	5,176,142,044.00	(736,389,743.00)	(14.23)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,027,168,071.00	1,061,156,436.00	(33,988,365.00)	(3.20)
Beban Lain-lain	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.0



4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. ASET

1.1 Aset Lancar

	2016 (Rp)	2015 (Rp)
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	0.00	0.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00
Persediaan	1,383,850.00	1,784,050.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,383,850.00	1,784,050.00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai masing-masing Rp.1,383,850,- dan Rp.1,784,050,-

Rincian Persediaan selengkapnya pada Lampiran 1

1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP No.7).

Saldo aset tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai masing-masing Rp.8,264,208,880,- dan Rp.7682,916,879,01,- dengan rincian jenis aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:



	2016 (Rp)	2015 (Rp)
ASET TETAP		
Tanah	1,384,145,800.00	286,127,400.00
Peralatan dan Mesin	5,428,329,831.71	5,281,649,831.71
Gedung dan Bangunan	3,460,688,371.00	3,430,688,371.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,447,304,024.00	7,427,304,024.00
Aset Tetap Lainnya	65,062,000.00	65,062,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(9,521,321,146.71)	(8,807,914,747.70)
JUMLAH ASET TETAP	8,264,208,880.00	7,682,916,879.01

1. Tanah

Untuk nilai aset tetap dari Tanah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp.1,384,145,800,- dan Rp.286,127,400,-. Terjadi peningkatan aset tanah senilai Rp.1,098,018,400,-.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB A)

2. Peralatan dan mesin

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp. 5,428,329,831.71,- dan Rp. 5,281,649,831.71,-. Terjadi peningkatan aset tanah senilai Rp. 146,680,000,-.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB B)

3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp. 3,460,688,371,- dan Rp.3,430,688,371,-. Terjadi peningkatan aset tanah senilai Rp.30,000,000.00 , -.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB C)



4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp. 7,447,304,024,- dan Rp. 7,427,304,024,-. Terjadi peningkatan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari tahun 2015 ke tahun 2016 senilai Rp.20,000,000,-

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB D)

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp.65,062,000,- dan Rp. 65,062,000,-. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) Aset Tetap Lainnya dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 (KIB E)

6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp.9,521,321,146.71,- dan Rp. 8,807,914,747.70,-.Terjadi peningkatan Akumulasi Penyusutan Aset tetap dari tahun 2015 ke tahun 2016 senilai Rp.713,406, 399.01,- hal ini terjadi sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah aset tetap selama tahun 2016.

1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah: (1) aset tak berwujud, (2) tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan, (3) Tuntutan Ganti Rugi, (4) aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan (5) kas yang dibatasi penggunaannya.



	2016 (Rp)	2015 (Rp)
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	43,801,953.99	1,192,109,777.26

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp. 43,801,953.99,- dan Rp.1,192,109,777.26,-. Terjadi penurunan Aset Lainnya dari tahun 2015 ke tahun 2016 senilai Rp.1,148,307,823.27,-.

Rincian selengkapnya pada Lampiran 7 (KIB Aset Lain-Lain)

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah (PSAP No.9). Rincian kewajiban pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Binjai tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat berikut;

	2016 (Rp)	2015 (Rp)
KEWAJIBAN		
Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	26,643,172.00
JUMLAH KEWAJIBAN	0.00	26,643,172.00

Tidak ada saldo jumlah kewajiban tahun 2016 pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai.

3. Ekuitas

URAIAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	8,850,167,534.27	15,892,667,124.28
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,167,792,288.00)	(13,256,511,360.00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	12,363,547,189.00	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	263,472,248.72	0.00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0.00	0.00
Ekuitas Antar SKPD	0.00	0.00
EKUITAS AKHIR	8,309,394,683.99	2,636,155,764.28



Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing senilai Rp.8,309,394,683.99,- dan Rp.8,850,167,534.27,-. Terjadi penurunan Saldo Ekuitas dari tahun 2015 ke tahun 2016 senilai Rp.540,772,850.28,-. Hal ini dikarenakan adanya koreksi ekuitas lainnya.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Binjai.

5.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai.

Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari:

1. Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Pertanian;
 - b. Seksi Lahan Pertanian;
 - c. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman.
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/ Kesehatan Hewan (Keswan);
 - c. Seksi Bina Usaha Peternakan.
5. Bidang Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Perikanan;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya;
 - c. Seksi Bina Usaha dan Hama/ Penyakit.
6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan.



7. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penyuluh;
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
8. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI);
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.2 Tugas Pokok dan Fungsi BAB III

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai, sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, peternakan, penyuluhan, perkebunan, perikanan dan peningkatan ketahanan pangan berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan, penyuluhan, perkebunan, perikanan dan peningkatan ketahanan pangan;



- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan, penyuluhan, perkebunan, perikanan dan peningkatan ketahanan pangan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan melalui penyuluhan secara intensif serta meningkatkan ketahanan pangan;
- d. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan usaha pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berorientasi pada agribisnis dan mempunyai daya saing yang tinggi;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, perbendaharaan, penghimpunan data dan perencanaan penyusunan program kerja dinas serta urusan umum lainnya.

Bidang Pertanian

Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang produksi, budidaya, bina usaha, perlindungan tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan lahan.



Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perikanan.

Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan, monitoring dan evaluasi penyiapan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan serta pemanfaatan tata guna air dan pengkajian iklim.

Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan.



Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD BBI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perikanan di bidang balai benih ikan.



BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dari kelompok Belanja Daerah, Aset, Kewajiban serta Ekuitas Dana.

Dengan laporan keuangan SKPD ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perikanan untuk tahun anggaran 2016. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan SKPD ini secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, turut dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai.

Binjai, Februari 2017

PENGUNA ANGGARAN

Ir. Dewi Anggeriani

NIP. 19630809 199203 2 002